MEMBANGUN REPUBLIK DESA

SEBUAH STRATEGI KEBUDAYAAN
Rekonstruksi Pemikiran
Jenderal TNI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Ide awal penyusunan buku "MEMBANGUN REPUBLIK DESA" – Sebuah Strategi Kebudayaan : Rekonstruksi Pemikiran Jenderal TNI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini timbul setelah membaca Disertasi SBY berjudul "PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PEDESAAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN : ANALISA EKONOMI-POLITIK KEBIJAKAN FISKAL". Sebuah karya tulis ilmiah yang disusun pada tahun 2004, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Kemudian diperkaya dengan beberapa karya tulis dan buku SBY berjudul : Kebijakan Fiskal Indonesia : Dinamika, Permasalahan dan Pilihan, 2003, Makalah Seminar Makroekonomi Lanjutan. Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Revitalisasi Ekonomi Indonesia : Bisnis, Politik, dan *Good Governance*, 2004. Pengurangan Kemiskinan di Indonesia : Mengapa Tidak Cukup dengan Memacu Pertumbuhan Ekonomi ?, 2004, serta ditemukannya tidak kurang dari 3000-an lembar Data Pers SBY dari 1976-2007, yang berisi konsepsi pemikiran-pemikirannya untuk membangun Negara dan Bangsa.

Dari hasil studi yang dilakukan selama enam bulan terakhir, terlihat benang merah antara konsepsi pemikiran SBY dengan para ilmuwan dan akademisi terhadap nasib dan kesejahteraan rakyat kecil, khususnya kemiskinan dan pengangguran yang terjadi pada masyarakat pertanian dan pedesaan. Menurut SBY kedua masalah ini sulit ditanggu langi bila strategi pembangunannya tidak terfokus dalam bidang pertanian dan pedesaan.[1]

---

[1] Kemiskinan dan pengganggguran merupakan masalah kritis di Indonesia. Teratasinya kedua masalah ini merupakan indikator penting bagi keberhasilan

Desa merupakan unit paling bawah dalam system pemerintahan di Indonesia, namun peran, fungsi dan kontribusinya justru menempati posisi paling vital dari segi administrasi Negara, lebih-lebih secara sosial.[2] Rakyat kita kebanyakan tinggal di desa, dan banyak masalah elementer yang hanya bisa dimulai mengatasinya dari unit wilayah di pedesaan. Sekitar 65% jumlah penduduk hidup didaerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Jumlah pedesaan di Indonesia mencapai sekitar 65.000 buah dan jumlah kabupaten dan kota hanya sebanyak kurang lebih 375 buah. Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup di sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sector tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya sangat berat pada sektor pertanian atau merupakan daerah yang berbasis agraris (*agriculture base*).

Dalam sistim sosial kemasyarakatan di Indonesia, desa merupakan unit terpenting untuk pencapaian cita-cita dasar bernegara dan berbangsa. Bahkan kalau kita ingin meletakkan dan mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak maka secara akademik dapat dikatakan desa merupakan unit paling relevan untuk mendapat perhatian Negara dan birokrasi Negara pada semua level maupun tokoh warga desa itu sendiri yang secara terus menerus perlu mendorong tumbuh

---

pembangunan nasional. Ditinjau dari struktur perekonomian nasional, sektor pertanian menempati posisi penting dalam kontribusi terhadap PDB riil tahun 2003. Pada saata krisis, sumbangan sector pertanian terhadap PDB mengalami peningkatan paling besar. Dari segei penyerapan tenaga kerja sekitar 46%. Dengan demikian sector pertanian dan pedesaan yang didonminasi oleh aktivitas ekonomi pertanian merupakan sector strategis dalam pembangunan nasional. Dengan kenyataan tersebut, pembangunan pertanian dan pedesaan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional, periksa Disertasi Susilo Bambang Yudhoyono, Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran : Analisis Ekonomi-Politik Kebijakan Fiskal, 2004, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

[2] Istilah pedesaan mencakup wilayah tempat sebagian besar aktivitas dari sector pertanian (dalam arti luas) berada, periksa DR. M. Mas'ud Said MM, 2007, dalam Madekhan Ali, Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Averroes Press.

kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan.[3]

Bila kita melakukan refleksi sejarah, akan ditemukan suatu pola homogen yang menempatkan desa sebagai basis eksploitasi sistematis dan berkelanjutan demi kepentingan Negara. Dizaman kolonial misalnya, meski secara ekonomi politik, peranan desa sebagai organisasi kekuasaan yang berotonami, namun kolonial memberlakukan desa sebagai alat untuk melakukan penetrasi dan ekploitasi terhadap sumerdaya alam maupun manusianya untuk kepentingan Negara dan kolonial semata.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, desa menjadi terkait langsung dengan keberadaan organisasi politik atau partai politik bergerak di tingkat *grass root* pedesaan. Situasi ini membawa Desa pada situasi ketertinggalan ekonomi dan dapat mengikis keharmonisan kehidupan pedesan. Politik pedesaan pada saat itu tidak mencerminkan artikulasi kepentingan nasional, tetapi lebih merupakan kepentingan-kepentingan komunitas kultural. Hal ini patut disesalkan tatkala kehidupan partai politik menempatkan dirinya pada posisi yang paling membanggakan dalam demokrasi liberal.

Orde Baru memposisikan desa sekedar obyek *top down bureaucratic approach* yang berorientasi pada target. Misalnya politik beras pada pada masa Orde Baru dimulai, bertepatan dengan dilancarkannya strategi revolusi hijau oleh organisasi-organisasi internasional. Melalui birokrasi lokal, orde baru mendorong terlaksananya berbagai kapitalisasi pertanian dengan Inmas dan Binmas yang merupakan persyaratan perusahaan multi nasional (MNC) untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Pemerintah desa diharuskan mencapai target-target yang telah ditentukan dari atas, untuk menekan petani-petani di wilayahnya melaksanakan pola pertanian yang didasakan pada teori modernisasi.

Data sensus penduduk tahun 2000, seitar 60% atau sebagian besar pendudu Indonesia saat ini mash bertempat

[3] *Ibid*

tinggal di kawasan pemukiman pedesaan. Saat ini kawasan pedesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan. Rendahnya produktivtas tenaga kerja ini bisa dilihat dari besarnya tenaga kerja yang ditampung disektor pertanian (46% dari 90,8 juta penduduk yang bekerja), padahal sumbangan sector pertanian dalam perekonomian nasional menurun menjadi 15,9% (Susenas, 2003).[4]

Sementara itu tingginya tingkat kemiskinan pedesaan dapat ditinjau dari indicator dan presentase penduduk miskin *(head count)*, maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin sebesar 37,3 juta jiwa (17,4%), dimana presentase penduduk miskin di pedesaan 20,2%, lebih tinggi dari perkotaan yang mencapai 13,6 %. Dengan penduduk dan angkatan kerja pedesaan yang terus bertambah, sementara pertumbuhan luas lahan pertanian relative tetap, maka penyerapan tenaga kerja disektor pertanian menjadi tidak produktif.[5] Hal tersebut di atas memberikan gambaran faktual kondisi yang terjadi dalam masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Sangat ironis memang, karena bicara mengenai Desa berarti kita berbicara tentang sebagian besar rakyat Indonesia, dalam wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas kurang lebih 4,8 juta km2 dengan luas daratan 1,9 juta km2 dengan rentang dari timur ke barat sekitar 5.110km dan 1880 km dari utara ke selatan.

Meski era pembangunan pasca kemerdekaan telah banyak kemajuan yang sangat menyolok, biarpun arus sumberdaya ke daerah pedesaan begitu besar, namun kemiskinan belum juga berkurang. Realitas kaum miskin diwarnai dengan ketidakberdayaan menyuarakan aspirasi, tidak mempunyai kekuatan, bahkan seringkali tidak tidak diperhitungkan dalam tata pemerintahan dalam berbagai tingkatan. Mereka tidak terorganisir, dan boleh dikatakan

---

[4] Prof,. DR. Sadu Wasistiono, MS dan M. Irwan Tahir, AP, M.Si, Prospek Pengembangan Desa, 2006, CV Fokusmedia, 2006, hal 1

[5] *Ibid*, hal 2

hidup tercerai berai dalam keluarga dan kerabatnya sekedar untuk mempertahankan hidup masing-masing.[6]

Urgensi membangun desa untuk rakyat desa sudah merupakan kesepakatan para *founding fathers* maupun perancang pembangunan di tingkat nasional. Trend baru paradigma pembangunan baik secara akademik, realistik maupun petimbangan praktis menempatkan aktor-aktor desa sebagai tuan rumah perubahan. Pada fase sekarang ini yang terpenting adalah berani memulai sedikit demi sedikit paradigma berbasis desa. Lambat laun pendekatan baru yang ditopang oleh kematangan sosial politik Indonesia akan memperlancar proses transisi yang nampaknya rumit sesuai kondisi riil desa yang membudaya. Situasi ini bukan hanya milik desa-desa di Indonesia, transisi itu dimiliki pula oleh hampir semua Negara-negara Asean yang berbasis pertanian seperti Thailand, Malaysia dan Myanmar. Dengan totalitas pengabdian untuk dari desa dari kader untuk desa dan dengan memberi tempat yang pantas dan semestinya kepada potensi desa, Negara-negara tersebut sekarang *leading* dengan hasil yang lebih nyata bagi pembangunan nasional mereka.

Pendekatan pembangunan desa di rancang untuk menciptakan peningkatan kondisi ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa. Pendekatan ini menitikberatkan pada pentingnya partisipasi penduduk, yang berorientasi pada kebutuhan, keswadayaan, peningkatan kesadaran, perenca naan *bottom-up*, dan pemberdayaan masyarakat. Aspek integrative dan keberlanjutan merupakan inti pendekatan ini. Pendekatan pembangunan masyarakat mendasarkan diri

---

[6] Bagi Erick W. Wolf (1969), hal ini menjadi salah satu alasan bagaimana sulitnya membangkitkan kesadaran petani untuk membangun organisasi yang mampu mewadahi perlawanan terhadap kemiskinan yang mendera mereka. *Pertama,* petani seringkali menggarap sawahnya sendiri daripada dengan kelompok, mereka bahkan sering terlibat dalam persaingan satu ama lain untuk memenuhi kebutuhanya. *Kedua,* kerasnya pekerjaan seringkali menekan para petani untuk bekerja secara rutin sepanjang tahun dan mempersiapkan tahun-tahun berikutnya. *Ketiga,* keterikatan terhadap keluarga besar atau kerabat dan saling tolong menolong dalam komunitasnya membuat petani terlena dari tantangan. *Keempat,* kungkungan pagar desanya membuat petani seringkali kehilangan kesempaan untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kepentingannya dengan bentuk tindakan yang tepat, periksa juga Soedjatmoko, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, 1983.

pada asumsi bahwa pembangunan berhulu di tingkat akar rumput *(grassroots level)*. Inisistif, kreativitas, dan tenaga mereka dapat didayagunakan untuk mengembangkan kehidupan mereka sendiri, dengan menggunakan proses demokratis dan kerja-kerja sukarela. Hal ini mengimplikasi kan bahwa melalui peningkatan kesadaran, orang-orang di tingkat akar rumput dibangunkan kesadaran akan potensi yang ada dalam diri mereka. Pada tataran ideal, para anggota masyarakat mengorganisir diri mereka dalam suatu perilaku demokratis, untuk : (a) menentukan kebutuhan sesuai isu-isu; (b) mengembangkan rencana dan strategi pemenuhan kebutuhan, dan (c) mengimplementasikan rencana yang ada dengan partisipasi sebesar mungkin dari masyarakat untuk meraup hasil-hasil pembangunan.[7]

Satu elemen pokok dalam strategi pembangunan nasional adalah partisipasi masyarakat. Hal ini telah muncul sebagai salah satu elemen inti pembangunan dengan mengacu pada sejumlah alasan berikut. *Pertama*, partisipasi masyarakat desa merupakan suatu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreatifitas masyarakat, demi lajunya aktifitas pembangunan. *Kedua*, partisipasi masyarakat desa juga akan membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat, dan membantu mengatur aktifitas pembangunan agar mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Diatas itu semua, partisipasi masyarakat desa merupakan cerminan pengakuan (*legitimacy)* mereka atas proyek maupun aktifitas, menumbuhkan komitmen masyarakat desa dalam implementasi program, dan demi penguatan daya tahan program. Pengalaman beberapa tahun terakhir menyiratkan bahwa ada keterkaitan signifikan antara tingkat intensitas partisipasi masyarakat desa dengan keberhasilan aktifitas pembangunan.

---

[7] Paparan di atas setidaknya akan menjawab kritik Robert Chambers terhadap kebebalan sekelompok "ilmuwan negative", pakar pembangunan desa yang-meski telah lebih dari tiga dasa warsa tidak menyadari kelemahan teori perembesan (*trickle down*), kecenderungan elit desa untuk menguasai manfaat pembangunan, kesengsaraan yang diderita golongan miskin dan nasib buruk perempuan pedesaan, periksa Chambers, Robert; 1978, Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang, LP3ES, Jakarta, hal 39-48

Keterlibatan masyarakat desa secara aktif, merupakan elemen kunci dalam pembangunan, yang dipengaruhi kondisi kontekstual tempat program pembangunan tersebut dilaksanakan. Terlebih lagi partisipasi juga beragam menurut kondisi dasar *(nature)* proyek pembangunan. Di sejumlah besar Negara, partisipasi masyarakat desa dalam pemba ngunan terjabar pada sebuah rangakaian jajaran dari partisipasi tingkat tinggi sampai partisipasi nominal. Keragaman ini tergantung pada banyak factor, termasuk model pembangunan, gaya manajemen, tingkat pember dayaan, dan konteks sosio-kultural suatu masyarakat. Kemajuan politik pihak pelaksana (*implementator)* program guna mendulang partisipasi dan potensi kelompok sasaran agar berpartisipasi juga merupakan faktor penentu.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan konsep yang berputar di sekitar partisipasi. Terma ini mengimplikasikan proses fasilitasi masyarakat desa agar mereka mampu memahami realitas lingkungannya, memikirkan factor-faktor yang membentuk lingkungan, dan bertindak untuk mendorong perubahan demi perbaikan keadaan. Pemberdayaan merupakan suatu yang melingkupi warga masyarakat desa dalam memutuskan dimana mereka sekarang, kemana mereka akan pergi, dan mengembangkan sekaligus mengimplementasikan rencana-rencana guna mencaai tujuan, berdasarkan kepercayaan diri dan pembagian wewenang. Yang terpenting, pemberdayaan masyarakat desa dapat menolong untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Pada intinya, kemauan masyarakat desa untuk berdikari, berpikir progresif, merencanakan dan mengimplementasikan perubahan secara sistematis, akan menerima hasil secara rasional.

Paradigma pembangunan pedesaan terpadu juga dikembangkan *Asian Center for Development Administration* (ACDA). Mereka memandang keseluruhan upaya pembangunan pedesaan sebagai sebuah proses yang mengarah pada peningkatan terus menerus kapasitas masyarakat desa untuk mengendalikan lngkungan mereka disetai perluasan distribusi keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan pengendalian tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan pedesaan harus dipandang sebagai sebuah proses peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk mengendalikan lingkungan mereka sendiri, dimana ini lebih dari sekedar pembangunan ekonomi maupun pertanian di desa. Konsepsi semacam ini akan mampu mendorong pembangunan simultan atau serempak di semua aspek kehidupan, meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Kedua, proses pembangunan pedesaan haruslah terus menerus mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mampu mempengaruhi, mengelola, mengendalikan seluruh lngkungan sekitar. Mendorong mereka menjadi inisiator dan pengawas perubahan lingkungan, ketimbang sebagai obyek pasif atas berbagai manipulasi dan pengendalian eksternal. Ketiga, konsep ini mencerminkan semakin besarnya penekanan pada pemerataan pemba ngunan keuntungan hasil kemajuan teknologi, dan semakin pentingnya mendorong partisipasi kelompok miskin dan lemah dalam proses pembangunan desa.

Pada tataran tujuan operasional, kiranya pendapat Fredericks bisa menjadi salah satu acuan paradigma pembangunan di atas.[8] Menurut Fredericks tujuan produktifitas *(productifity goals)* : meningkatkan produk tifitas melalui penerapan teknologi pembangunan yang sesuai dengan kondisi pedesaan. Tujuan keadilan (*equity goals*) : memperbesar pengawasan atas keuntungan dari meningkatnya produktifitas demi mewujudkan pembagian hasil pembangunan yang lebih adil. Tujuan penciptaan lapangan kerja *(employment generation goals)* : pembangunan atau pemasyarakatan teknologi yang bersifat padat karya, termasuk pemberdayaan insdustri kecil yang terutama diarahkan untuk memaksimalkan pendayagunaan berbagai sumber daya desa. Tujuan akses (*acces goals*) : demokratisasi pelayanan sosial dasar yang mampu menjangkau kalangan miskin, sekaligus pengembangan system yang efektif dalam pemberian berbagai pelayanan sosial tersebut. Tujuan control (*control goals*) : peningkatan kapasitas penduduk desa agar secara kreatif mampu

[8] *Ibid.*, hal. 126

mengawasi lingkungan sekitar, dan menempatkan mereka sebagai pelaku utama proses pembangunan.

Lebih jauh Samonte[9] memberikan suatu konsepsi tentang pembangunan desa integrative yang lebih memusatkan pada suatu aktifitas pembebasan. Menurutnya, pembangunan pedesaan integrative merupakan sebuah upaya membebaskan energi masyarakat desa, khususnya kaum miskin, sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas dan komitmen untuk mengembangkan, meng organisir, dan menata diri mewujudkan suatu kualitas hidup yang lebih tinggi. Secara lebih spesifik Samonte menja barkan sasaran pembangunan desa integrative sebagai berikut : Meningkatkan produktifitas ekonomi dengan titik berat pada peningkatan produktifitas pertanian. Menyediakan lapangan kerja yang lebih besar. Mendorong terwujudnya distribusi pendapatan yang lebih adil. Menyediakan system yang lebih efektif dalam pemberian pelayanan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perangkat lain mewujudkan kesejahteraan sosial. Memperbesar tingkat paratisipasi masyarakat desa dalam pembuatan keputusan, khususnya berkenaan dengan pembangunan lokal.

Berangkat dari kenyataan semakin tercabutnya otoritas asli, keswadayaan, dan kemandirian sebagai kekhasan otonomi desa, maka penguatan otonomi desa dimaknai sebagai upaya sistematik untuk mengubah wajah desa ke arah terciptanya tatanan masyarakat baru yang berbasis prakarsa rakyat. Hal paling mendasar dari pengertian ini adalah partisipasi aktif warga desa untuk menentukan arah dan bentuk tatanan yang berlaku di daerah setempat. Warga desa merupakan pihak pertama paling berkepentingan dengan seluruh proses dan hasil dari penataan kehidupan masyarakat desa.

Pada aras sosiologi, titik masuk pertama bagi penguatan otonomi desa adalah revitalisasi rembug desa, musyawarah kelembagaan adaptasi pedesaan. Sebenarnya sejak dulu masyarakat desa sudah memiliki pengalaman tradisi politik yang terkait dengan demokrasi. Kontrol sosial

---

[9] *Ibid.*, hal. 134

di desa yang berwujud tata krama, tata susila dan tata cara misalnya, merupakan bentuk demokrasi yang mengajaran toleransi, penghormatan kepada sesama, kesantunan, dan kebersamaan. Tata cara pun kemudian menjadi mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, pekawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah dan sebagainya. Pada tataran praksis, demokratisasi desa bisa dirintis dengan penggalangan pemahaman bersama terhadap pentingnya pengawalan terhadap segenap produk kebijakan publik di tingkat lokal. Kebijakan lokal berarti keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan diumumkan atas nama pemerintah desa yang berdampak baik positif maupun negative terhadap kehidupan masyarakat setempat.

Dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah dimaksudkan guna mewujudkan pemerintahan daerah yang baik berdasarkan semangat keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan penggiatan masyarakat. Berdarakan pada semangat desentralisasi pemerintahan di atas, dibutuhkan keterlibatan masyarakat desa, inisiatif dan kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Masyarakat desa melalui suatu proses demoktatis, akan menentukan arah dan perangkat untuk mewujudkan tatanan hidup yang lebih baik. Disini kerjasama segitiga antara pemerintah pusat, masyarakat desa dan kalangan swasta merupakan salah satu kunci bagi proses transformasi yang demokratis, berkeadilan dan berlanjut.

Pada masa sekarang ini peranan pemerintahan desa sebagai struktur perantara – yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa – perlu tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya, yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi perlu memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalanakan melalui Pemerintah Desa.

Untuk menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu senantiasa dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi dengan pembangunan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relative seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa adanya Pemerintaan Desa yang kuat, Desa dengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relative lebih kuat posisinya. Dari latar belakang ini Republik Indonesia sebenarnya merupakan pengejawantahan dari Pemerintahan Desa yang bisa kita sebut sebagai Republik Desa. Oleh karena itu dalam proses pembangunan kita tidak bisa menganggap remeh kontribusi desa dalam pemba ngunan, dan menganggap sebagai anak tiri.[10]

Tata kepemimpinan, tata pemerintahan, tata kemasyarakatan serta tata ruang dan lingkungannya, secara internal merupakan unsur penyusunan system Desa secara keseluruhan. Dengan didukung perencanaan yang matang melalui Rencana Umum Pengembnagan Otonomi Desa serta pemberian dana perimbangan desa atau Alokasi Dana Desa, diharapkan akan semakin memperkuat keberdayaan desa mengemban otonominya kedepan. Oleh karena itu untuk membangun dan mengembangkan desa menuju kemandiri an, harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif integral dan tidak bersifat *piece by piece.*[11]

---

[10] Pada masa Orde Lama, desa terkait langsung dengan keberadaan organissi politik atau partai politik yang bergerak di tingkat *grass root* pedesaan. Situasi ini membawa Desa pada situasi ketertinggalan ekonomi dan mengikis keharmonisan kehidupan pedesaan, periksa Madekhan Ali, 2007, Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Averroes Press.

[11] Pembangunan desa seharusnya menerapkan prinsip-prinsip : (1) transparansi / keterbukaan, (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan *(suistinable)*, periksa Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Imu 2006.

Manusia bukan sekedar potensi demografis semata, akan tetapi ia terutama dan pada hakikatnya merupakan suatu potensi kulturil yang mampu menggerakkan, mengubah dan memberi makna bagi kehidupan dan perkembangan dunia.[12] SBY dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI yang senantiasa bergulat dengan berbagai peristiwa dan masalah Negara dan Bangsa pada hakikatnya juga merupakan potensi kulturil. Transformasi konsep pemikiran SBY telah menjadi bagian dari proses pemba ngunan yang dapat mempertingi derajat kemanusiaan Indonesia, dan diharapkan pula dapat mempertingi derajat perkembangan sejarah Indonesia.

Pengalaman-pengalaman SBY baik dibidang praktis riil maupun di dalam bidang pemikiran Negara dan Kebangsaan telah membawa kepada satu kesimpulan bahwa konsepsi pemikiran-pemikiran SBY masuk dalam tataran Strategi Kebudayaan, yang bukan saja dapat dipakai para Menteri dalam pemerintahan SBY, akan tetapi dapat pula dimanfaatkan bagi para Pemimpin atau calon pemimpin Indonesia masa depan. Dengan tampilnya konsepsi pemikiran-pemikiran Kenegaraan dan Kebangsaan tersebut cukup menjadi beralasan apabila pemikiran Jenderal TNI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, dikategorikan sebagai Strategi Kebudayaan SBY.

Tim Penyusun

Wresniwiro
Dr Nurinwa Ki S Hendrowinoto
Muhamad Akbar Linggaprana

---

[12] Manusia merupakan potensi radikal, sebab peristiwa-peristiwa dan masalah-masalah itu sumbernya adalah manusia : dari manusia dan oleh manusia. Sebagai potensi kulturil manusia harus bergulat agar segala peristiwa dan masalah dikuasai dan ditransformasikan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari proses yang dapat semakin mempertingi derajat kemanusiaan, dan dengan demikian akan mempertinggi derajat perkembangan sejarah, periksa Strategi Kebudayaan Ali Moertopo, 1978, Yayasan Proklamasi Centre For Strategic And International Studies, Jakarta.